BAB II

PERSPEKTIF TEORETIK

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Konflik

Kata konflik ini mengandung banyak pengertian. Ada pengertian yang negatif, konflik dikaitkan dengan: sifat-sifat animalistic, kekerasan, penghancuran, dan seterusnya. Dalam pengertian positif, konflik dihubungkan dengan peristiwa: hal-hal baru, pertumbuhan, perkembangan, perubahan dan seterusnya. Sedangkan dalam pengertian yang netral, konflik diartikan sebagai: akibat biasa dari keanekaragaman individu manusia dengan sifat-sifat yang berbeda, dan tujuan hidup yang tidak sama pula.[11]

Istilah konflik cenderung menimbulkan respon-respon yang bernada ketakutan atau kebencian, padahal konflik itu sendiri merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam pengembangan dan perbuatan. Konflik juga dapat memberikan akibat yang merusak terhadap diri seseorang, anggota kelompok, maupun terhadap masyarakat. Sebaliknya konflik juga dapat membangun kekuatan yang kontruktif dalam hubungan kelompok. Konflik merupakan suatu sifat dan komponen yang penting dari

---

[11] Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses kelompok, yang terjadi melalui cara-cara yang digunakan orang untuk berkomunikasi satu sama lain.[12]

Pengertian konflik yang didefinisikan Pruitt dan Rubin dengan mengutip Webster bahwa "konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan. (*Perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan". Jika memahami konflik adalah persepsi, aspirasi, dan aktor yang terlibat di dalamnya. Artinya di dalam dunia sosial yang ditemukan persepsi, maka akan ditemukan pula aspirasi dan aktor. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar orang (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antar kelompok dengan negara (*vertical conflict*), konflik antar negara (*interstate conflict*).

Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya, manusia di dunia ini pada dasarnya memiliki sejarah konflik dalam skala antar perorangan sampai antar negara. Konflik yang bisa dikelola secara arif dan bijaksana akan mendominasi proses sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan. Namun dalam catatan sejarah masyarakat dunia, konflik sering diikuti oleh bentuk-bentuk kekerasan, seperti perang dan pembantaian.[13]

Otomar j. Bartos dan Paul Wehr mendefinisikan konflik sebagai "situasi pada saat para aktor menggunakan perilaku konflik melawan satu

---

[12] Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hal. 158

[13] Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 5-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama lain untuk menyelesaikan tujuan yang berseberangan atau mengekspresikan naluri permusuhan".

Dalam definisi itu sebenarnya Bartos dan Wehr memasukkan unsur dalam perilaku konflik sebagai unsur pemicu konflik. Perilaku konflik merupakan berbagai bentuk perilaku yang diciptakan oleh seseorang atau kelompok untuk membantu mencapai apa yang menjadi tujuan atau mengekspresikan permusuhan pada musuh atau para pesaing mereka. Menurut Bartos dan Wehr perilaku konflik dipilah menjadi tindakan koersif (*coersive action*) merupakan bentuk tindakan sosial yang memaksa pihak lawan untuk melakukan sesuatu yang pihak lawan tidak ingin melakukannya. Sedangkan non koersif (*non coersive action*) adalah upaya mencari jalan keluar dari hubungan konflik.[14]

Menurut Lewis A Coser, konflik adalah suatu perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan yang berkenaan dengan status dan kekuasaan. Pendapat Coser mengenai konflik sosial sebagai suatu hasil dari faktor-faktor lain daripada perlawanan kelompok kepentingan dan juga memperlihatkan konsekuensi konflik dalam stabilitas dan perubahan sosial.

Konflik tidak hanya berwajah negatif. Konflik memiliki fungsi positif terhadap masyarakat melalui perubahan-perubahan sosial yang diakibatkannya. Yang pasti konflik tidak terus menerus dihindarkan dalam hubungan antar manusia, karena tabrakan kebutuhan dapat saja terjadi

---

[14] *Ibid*....., hal. 57-58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kebutuhan setiap manusia berubah-ubah serta dapat menghasilkan kombinasi-kombinasi yang kompleks.[15] Coser berpendapat bahwa konflik dapat menyatukan sebuah kelompok lebih erat dan memadukannya dengan baik. Hal ini disebabkan karena konflik itu menolong kelompok untuk lebih efektif dengan adanya keterbukaan dalam menilai struktur yang ada dan memungkinkan ada perumusan yang tajam tentang sasaran atau tujuan dan kebutuhan kelompok. Konflik yang produktif dan positif akan membuat semua pihak merasa bahwa sesuatu telah dicapai bersama.[16]

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Konflik

Coser memberikan perhatian terhadap asal muasal konflik sosial, sama seperti pendapat Simmel bahwa ada keagresifan atau bermusuhan dalam diri orang, dan dia memperhatikan bahwa dalam hubungan intim dan tertutup, antara cinta dan benci hadir. Coser melihat unsur dasar konflik, yaitu *hostile feeling*, akan tetapi bagi Coser *hostile feeling* belum tentu menyebabkan konflik terbuka (*overt conflict*) sehingga Coser menambahkan unsur perilaku permusuhan (*hostile behavior*). Perilaku permusuhan inilah yang menyebabkan masyarakat mengalami situasi konflik.

Coser memberikan dua dasar tipe konflik:

a. Konflik realistis : memiliki sumber yang konkrit atau bersifat material, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah

---

[15] *Ibid*..., hal. 53-53

[16] Robby L. Candra, *Konflik Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh sumber perebutan itu, dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik akan segera diatasi dengan baik.

b. Konflik non-realistis : didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik ini seperti konflik antar agama, antar etnis, dan konflik antar kepercayaan lainnya.

Coser memberi perhatian pada adanya konflik eksternal yang mampu memperkuat identitas konflik. Ia menyatakan "...konflik membuat batasan – diantara dua kelompok". Dalam sistem sosial dengan memperkuat kesadaran dan kesadaran kembali atas keterpisahan, sehingga menciptakan kesadaran identitas kelompok dalam sistem. Selain konflik eksternal, konflik internal memberi fungsi positif terhadap kelompok identitas mengenai adanya kesalahan perilaku, ada perilaku anggota yang dianggap menyimpang dari teks norma kelompok sehingga perlu dikoreksi oleh kelompok tersebut. Selain itu, konflik internal merupakan mekanisme bertahan dari eksistensi suatu kelompok.[17]

Konflik mengandung suatu pengertian tingkah laku yang luas daripada yang biasa dibayangkan orang dengan mengartikannya sebagai pertentangan yang kasar dan perang. Dasar konflik berbeda-beda. Dalam hal ini terdapat tiga elemen dasar yang merupakan ciri-ciri dari situasi konflik, yaitu:

a. Terdapatnya dua atau lebih unit-unit atau bagian-bagian yang terlihat di dalam konflik.

---

[17] Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 54-56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Unit-unit tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan yang tajam dalam kebutuhan-kebutuhan, tujuan-tujuan, masalah-masalah, nilai-nilai, sikap-sikap, maupun gagasan-gagasan.

c. Terdapatnya interaksi di antara bagian-bagian yang mempunyai perbedaan-perbedaan tersebut.[18] Posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasi kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas "selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis".

d. Kekuasaan

Adalah kemampuan untuk memenangkan kemauannya sendiri, jika kemampuan itu bertentangan dengan kemauan orang lain, maka yang menduduki posisi / yang berkuasa diharapkan mengendalikan bawahan. Artinya mereka berkuasa karena harapan dari orang-orang yang berbeda di sekitar mereka dengan adanya orang yang berkuasa tentu akan terdapat sebagian orang besar orang di bawah wewenang mereka.

e. Kepentingan

Di dalam sikap asosiasi, orang yang berada pada posisi di mana berupa mempertahankan status quo, sedangkan orang berada pada posisi subordinate berupaya mengadakan perubahan. Konflik kepentingan di dalam asosiasi selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang

---

[18] Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: usaha Nasionalis, 1986), hal. 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersembunyi ini berarti legitimasi otoritas selalu terancam, konflik kepentingan ini tak selalu perlu disadari oleh pihak subordinate (relasi bawahan dengan atasan) dan superordinate (relasi atasan dengan bawahan) dalam rangka melakukan aksi. Kepentingan subordinate dan superordinate adalah obyektif, dalam arti bahwa kepentingan itu tercermin dalam harapan (peran) yang dilakukan pada posisi. Bila individu menempati posisi tertentu, mereka akan berperilaku menurut cara yang diharapkan.[19]

3. Jenis dan Tipe Konflik

Kita mempunyai dua jenis konflik, *pertama*: dimensi vertikal atau "konflik atas" yang dimaksud adalah konflik antara elite dan massa (rakyat). Elite disini bisa para pengambil kebijakan dan tingkat pusat, kelompok bisnis dan aparat militer.

Hal yang menonjol dalam konflik ini adalah digunakannya instrumen kekerasan negara, sehingga timbul korban di kalangan massa (rakyat). *Kedua*: konflik horisontal, yang tergolong besar pengaruhnya:

a. Konflik antar agama, khususnya antara kelompok agama Islam dan kelompok agama Nasrani.
b. Konflik antar suku, khususnya antara suku Jawa dan suku-suku lain di luar pulau Jawa. Selain itu muncul pula kasus seperti konflik antara

[19] George Ritzer dan Dongles J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 154-156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suku Madura dengan suku Melayu di Kalimantan Barat (Pontianak dan Sambas).[20]

Selain jenis-jenis konflik, kita perlu mengenal istilah tipe konflik yang akan menggambarkan persoalan sikap, perilaku, dan situasi yang ada, adapun tipe-tipe konflik adalah:

a. Pada taraf di dalam diri seseorang

   Yaitu konflik yang menunjukkan kepada adanya pertentangan, ketidakpastian, atau emosi-emosi dan dorongan-dorongan yang antagonis di dalam diri seseorang.

b. Pada taraf kelompok

   Konflik-konflik ditimbulkan dari konflik-konflik yang terjadi di dalam diri individu dari perbedaan-perbedaan pada para anggota kelompok dalam tujuan-tujuan, nilai dan norma, motivasi mereka untuk menjadi anggota kelompok, serta minat-minat mereka.

c. Pada taraf masyarakat

   Konflik bersumber pada perbedaan diantara nilai dan norma kelompok dengan nilai-nilai dan norma-norma kelompok lain di dalam masyarakat tempat kelompok yang bersangkutan berada. Perbedaan-perbedaan dalam tujuan, nilai dan norma, serta minat: disebabkan oleh adanya perbedaan pengalaman hidup dalam sumber sosio ekonomi di dalam suatu kebudayaan tertentu dengan yang.[21]

---

[20] Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 92

[21] Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasionalis, 1986), hal. 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tipe-tipe konflik juga terdiri dari: tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik di permukaan.

a. Tanpa konflik, menggambarkan situasi yang relatif stabil, hubungan-hubungan antar kelompok bisa saling memenuhi dan damai, tipe ini bukan berarti tidak ada konflik berarti dalam masyarakat, akan tetapi ada kemungkinan atas situasi ini.
   1) Pertama : masyarakat mampu menciptakan struktur sosial yang bersifat mencegah ke arah konflik kekerasan.
   2) Kedua : sifat budaya yang memungkinkan anggota masyarakat menjauhi permusuhan dan kekerasan.
b. Konflik laten adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani.
c. Konflik terbuka adalah situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan efeknya.
d. Konflik di permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan mengikatkan komunikasi.[22]

[22] Novri Susan, *op.cit.*, hal. 92-93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Uraian Tentang Kiai

1. Pengertian Kiai

Istilah kiai berawal dari kelompok benda-benda kuno yang dimiliki para penguasa di tanah Jawa (Raja, Senopat, atau para Punggawa kerajaan). Benda berupa pasukan mengandung kekuatan ghaib yang dipercaya masyarakat dapat menentramkan dan memuliakan kekuasaan dan ketentraman suatu daerah atau negara.[23]

Selain itu kiai mendapat sebutan ulama yaitu orang yang selain selama hidupnya dengan khusyuk menjalankan ibadah semata-mata karena Allah, juga mendalami ilmu agama dan memiliki kewenangan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an dan al-Hadits untuk menjadi rujukan masyarakat umum.

Kiai adalah juga orang yang membuka lahan pertanahan menjadi sebuah desa tempat perkampungan masyarakat. Kita sering menemukan mitos yang beredar dalam masyarakat bahwa desa yang ditempati kiai menjadi tentram, aman dan barokah. Lantaran itu keberadaannya terhormat sebagai pemilik sifat-sifat kemuliaan, budi pekerti yang luhur.[24]

Kiai juga tidak hanya sebagai ahli ilmu keagamaan, yang sikap dan tindakannya dijadikan rujukan masyarakat, melainkan juga menjadi pemimpin masyarakat yang seringkali dimintai pertimbangan dalam menjaga stabilitas keamanan desa.[25]

---

[23] Soekamto, *Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999), hal. 84-85

[24] *Ibid*, hal. 86-88

[25] *Ibid*, hal. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam al-Qur'an terdapat kata ulama atau kiai yaitu dalam surat Fatir ayat 28 dan dalam surat Asy-Syu'ara' ayat 197:

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (٢٨)

Artinya: "*Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun*"[26]

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٩٧)

Artinya: "*Dan Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa Para ulama Bani Israil mengetahuinya?*"[27]

2. Peran Kiai Dalam Masyarakat

Kedudukan kiai di dalam masyarakat diakui sebagai pemimpin, umumnya bersifat informal, kewibawaan mereka kerapkali melibatkan pemimpin-pemimpin formal, mereka umumnya disegani, dipatuhi dan juga dicintai.[28] Hubungan antara kiai dengan masyarakat diikuti dengan emosi keagamaan yang membuat kekuasaan saatnya semakin berpengaruh charisma yang menyertai aksi-aksi kiai juga menjadikan hubungan itu penuh emosi, karena kiai telah menjadi penolong bagi para penduduk dalam memecahkan masalah-masalah mereka, yang tidak hanya terbatas

---

[26] Depag RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), hal. 791

[27] *Ibid*, hal. 666

[28] Tholha Hasan, *Islam dan Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hal. 229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada masalah spiritual tetapi juga mencakup aspek kehidupan yang lebih luas, maka para penduduk juga menganggap kiai sebagai pemimpin dan wakil mereka dalam sistem nasional.

Keberhasilannya dalam menunjukkan peran penting tersebut .....mengarah secara hampir tak terelakkan pada penempatannya tidak hanya sebagai seorang mediator hukum dan doktrin Islam tetapi juga sebagai kekuatan suci itu sendiri.

Di bawah kondisi-kondisi seperti ini, kiai di Jawa mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat dan memainkan peran krusial dalam menggerakkan aksi sosial dan bahkan politik.

Posisi terhormat kiai pada dasarnya berasal dari fakta bahwa Islam menekankan pentingnya pengetahuan yang harus di kejar oleh semua umat Islam. Dalam al-Qur'an dan Hadits, selalu ditekankan bahwa mencari ilmu adalah bagian penting dari kehidupan umat Islam dan bahwa seorang muslim yang berpengetahuan mempunyai status yang lebih tinggi di hadapan Allah SWT.[29]

3. Sumber-Sumber Kewibawaan Seorang Kiai
   a. Sumber kewibawaan moral yang muncul dari superioritasnya di bidang keagamaan. Di mata para pengikutnya kiai selain memiliki pengetahuan keagamaan juga memiliki kekuatan spiritual melebihi orang kebanyakan.

---

[29] Ending Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), hal. 97-98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kiai sering kali tidak hanya seorang guru atau pemimpin pesantren, namun juga memiliki kedudukan ini memberi motivasi yang sangat kuat di lingkungan pesantren.
c. Jaringan antara kiai, berasal dari bermacam-macam basis, perkawinan merupakan salah satu yang terpenting.
d. Relasinya dengan pemerintah dan pusat-pusat kekuasaan di luar.
e. Kualitas pribadinya seperti penguasaan terhadap hukum Islam dan terhadap kitab-kitab tertentu, garis keturunan, charisma, ataupun daya tarik yang bersifat pribadi (perawakan gagah dan tampan, ramah dan sebagainya), keluasan pengaruh seorang kiai di lingkungan masyarakat pedesaan sering kali menunjuk kepada kualitas pribadi sang kiai.[30]

Terdapat beberapa aspek yang membentuk kepemimpinan kiai dalam kehidupan masyarakat, antara lain:

a. Aspek Intelektual

Aspek ini meliputi kriteria keilmuan yang berupa penguasaan ilmu-ilmu agama Islam, pengakuan masyarakat, karakteristik pribadi yang tercermin dalam moralitas yang dianutnya dan hubungan genelogis di mana tradisi pesantren dalam hal ini masih kuat.

b. Aspek Fungsional

Yang berkaitan dengan pertanyaan atau kiai secara konkrit dalam kehidupan masyarakatnya, fungsi kepemimpinan kiai memiliki tiga sifat utama, yaitu:

---

[30] Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat, Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hal. 155-158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Memimpin penyelenggaraan upacara peribadatan (ritus) keagamaan.
2) Menjadi tempat bertanya bagi masyarakat dalam banyak hal seperti kehidupan keluarga, keagamaan dan pengobatan.
3) Menjadi teladan dalam tingkah laku sosial.

c. Aspek Status Sosial

Membagi para ulama ke dalam 2 kategori besar, yaitu:

1) Kiai yang mempunyai status sosial vertikal, sebagai tokoh organisasi dengan hirarki yang jelas, baik dalam ukuran nasional maupun profesional.
2) Kiai yang mempunyai status sosial horisontal, yang umumnya berpusat di pesantren, tidak menduduki jabatan formal dalam organisasi masyarakat tetapi mempunyai pengertian yang mendalam pada masyarakat.

d. Aspek kekerabatan

Membentuk jaringan kepemimpinan antara keluarga kiai, para kiai saling menjalani dalam ikatan kekerabatan yang intensitas tali-temalinya sangat kuat, semakin masyhur kedudukan seorang kiai, semakin luas jaringan kekerabatannya dengan kiai lainnya.[31]

4. Fungsi dan Kewajiban Ulama

a. Dakwah dan penegak Islam serta pembentuk kader penulis

1) Memimpin dan menggerakkan pelaksanaan "*iqomatuddin*"

---

[31] Muhammad Tolhah Hasan, *op.cit.*, hal. 229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a). Mengatur dan melaksanakan dakwah islamiyah terhadap semua lapisan / golongan masyarakat.

b). Menyelenggarakan dan mengembangkan dakwah islamiyah.

2) Membina persatuan dan kesatuan dalam menunaikan tuags-tugas kewajiban "*iqomatuddin*"

b. Pengkajian Islam dan Pembangunan

1) Senantiasa menggali ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah.

2) Menemukan dan mengemukakan gagasan-gagasan baru yang Islami untuk memperbaiki / untuk meningkat kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

c. Perlindungan dan pembelaan terhadap Islam dan umat Islam

1. Mencintai dan melindungi "*dhuafa', fuqara' wa masakin*".

2. Memperjuangkan dan membela kepentingan Islam dan umat Islam.[32]

d. Pemimpin masyarakat jika ditampilkan dalam kepemimpinan organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik.

e. Pemimpin keilmuan, jika ditampilkan dalam kepemimpinan pengajian atau sebagai mubaligh

f. Pemimpin kerohanian jika ditampilkan dalam kegiatan peribadatan, seperti sebagai imam dan khotib di masjid-masjid atau sebagai guru tarekat.

---

[32] Abdul Qadir Jailani, *Peran Ulama dan Santri Dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), hal. 5-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Pemimpin administrasi jika berperan dalam lembaga-lembaga pendidikan dengan pengelolaan yang terorganisir secara modern.[33]

C. Uraian Tentang Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.[34]

Kepala desa adalah penyelenggaraan pengurusan rumah tangga desa dan penyelenggara pemerintahan desa. Meskipun demikian di dalam melaksanakan tugasnya kepala desa memiliki batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginan sendiri.

Kepala desa wajib melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Kepala desa juga mempunyai kedudukan mewakili desa sebagai badan hukum. Akan tetapi di dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam urusan yang penting, kepala desa sedapat mungkin meminta pertimbangan dari anggota

---

[33] Mohammad Tholhah Hasan, Islam Dalam Perstektif Sosio Kultural.....hal 230
[34] *Pemerintah Desa dan Kelurahan,* (Bandung: Fokus Media, 2008), hal. 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pamong desa yang lain. Di dalam mengambil keputusan yang bertalian dengan hajat hidup penduduk desa, kepala desa terus meminta pendapat orang yang di pandangan sesepuh dan yang menurut adat dipandang terkemuka, dan mengadakan musyawarah dengan penduduk desa, melalui rapat desa. Jika suatu saat timbul kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya maka kepala desa harus menanggung kerugian itu.[35]

2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kepala Desa
   a. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pasal 14 urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
   b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai wewenang:
      1) Mengajukan rancangan peraturan desa
      2) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
      3) Membina kehidupan masyarakat desa
      4) Membina perekonomian desa
      5) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

      Pasal 15
   c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14, kepala desa mempunyai kewajiban:
      1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

[35] Bayu Surianingrat, *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hal. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
4) Melaksanakan kehidupan demokrasi
5) Menjalani hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.[36]

3. Pemilihan Kepala Desa

a. Pasal 43

1) BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memberikan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

b. Pasal 44

Calon kepala desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah.

[36] Pemerintah desa dan kelurahan, (Bandung: Fokus Media, 2008), hal. 10-11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Berpendidikan paling rendah tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama dan atau sederajat.
4) Berusia paling rendah 25 tahun
5) Bersedia di calonkan menjadi kepala desa
6) Penduduk desa setempat, dan lain-lain.

c. Pasal 45

Penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang pada hari itu pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah nikah dan mempunyai hak pilih.

d. Pasal 52

Masa jabatan kepala desa adalah 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.[37]

D. Kajian Teoretik

Untuk menjelaskan adanya sebuah konflik yang ada di Desa Gedangan, Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan yaitu antara kiai dengan kepala desa pasca pemilihan kepala desa, kami mencoba menggunakan pendekatan pendapatnya Dahrendorf tentang konflik, yaitu "wewenang" dan "posisi" sebagai konsep sentral teorinya dan mata rantai antara konflik dan perubahan sosial.

---

[37] *Pemerintah Desa dan Kelurahan*, (Bandung: Fokus Media, 2008), hal. 23-27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dahrendorf memulai teorinya dengan bersandar pad fungsinalisme struktural. Dia mengatakan bahwa dalam fungsionalisme struktural, keseimbangan atau kestabilan bisa bertahan karena kerjasama yang sukarela atau karena konsensus yang bersifat umum. Sedangkan dalam teori-teori konflik, kestabilan atau keseimbangan terjadi karena paksaan. Hal itu berarti bahwa dalam masyarakat ada beberapa posisi yang mendapat kekuasaan dan otoritas untuk menguasai orang lain sehingga kestabilan bisa dicapai.

Kenyataan ini membawa Dahrendorf kepada tesis penting yang dikemukakannya yakni bahwa distribusi otoritas atau kekuasaan yang berbeda-beda merupakan faktor yang menentukan bagi terciptanya konflik sosial yang sistematis. Menurut Dahrendorf di dalam Raho, berbagai posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Kekuasaan atau otoritas itu tidak terdapat secara intrinsik di dalam pribadi-pribadi melainkan dalam posisi-posisi yang mereka tempati. Kekuasaan atau otoritas selalu mengandung dua unsur, yaitu penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai.[38]

Konsep sentral teori Dahrendorf adalah "wewenang" dan "posisi". Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Dahrendorf menganalisa konflik dengan mengidentifikasi berbagai peranan dan kekuasaan dalam masyarakat.

---

[38] Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), hal. 78-79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi Dahrendorf konflik muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat dalam konflik. Dahrendorf memahami relasi-relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Dahrendorf mendefinisikan kekuasaan : "kemungkinan bahwa satu aktor dalam suatu hubungan sosial akan berbeda dalam posisi melakukan perlawanan tanpa melihat dasar kemungkinan itu menyerah". Sedangkan menurut Wallace dan Wolf, esensi kekuasaan yang dimaksudkan oleh Dahrendorf adalah kekuasaan kontrol dan sanksi sehingga memungkinkan mereka yang memiliki kekuasaan memberi berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Jadi dalam pandangan Dahrendorf, konflik kepentingan menjadi fakta tak terhindarkan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan.

Kekuasaan dalam masyarakat modern dan industrial bisa diterjemahkan sebagai wewenang (*authority*). Model kekuasaan Dahrendorf ini tampaknya dipengaruhi oleh tipe ideal kekuasaan dari Max Weber yang menyebut wewenang legal formal sebagai sumber kekuasaan masyarakat modern.[39]

Teori konflik Dahrendorf adalah mata rantai antara konflik dan perubahan sosial. Konflik memimpin ke arah perubahan dan pembangunan, karena dalam situasi konflik golongan yang berkonflik melakukan tindakan perubahan dalam struktur sosial. Kalau konflik-nya hebat maka yang terjadi

---

[39] Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 49-50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah perubahan secara radikal. Bila konflik-nya disertai kekerasan maka perubahan struktur akan efektif. Dahrendorf melihat masyarakat selalu dalam kondisi konflik dengan mengabaikan norma-norma dan nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam masyarakat.[40]

Resolusi dalam konflik antara kelompok-kelompok itu adalah redistribusi kekuasaan atau wewenang, kemudian menjadikan konflik itu sebagai sumber dari perubahan dalam sistem sosial. Selanjutnya sekelompok peran baru memegang kunci kekuasaan dan wewenang dan yang lainnya dalam posisi di bawahnya yang diatur. Redistribusi kekuasaan dan wewenang merupakan pelembagaan dari kelompok peranan baru yang mengatur (*ruling roles*) versus peranan yang diatur (*ruled roles*), dimana dalam kondisi khusus kontes perebutan wewenang akan kembali dengan inisiatif kelompok kepentingan yang ada, dan dengan situasi kondisi yang bisa berbeda. Sehingga kenyataan sosial merupakan siklus tak berakhir dari adanya konflik wewenang dalam bermacam-macam tipe kelompok terkoordinasi dari sistem sosial.

Konflik sosial dalam teori ini berasal dari upaya merebut dan mempertahankan wewenang dan kekuasaan antara kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya. Hanya dalam bentuk wewenang dan kekuasaan yang bagaimanakah konflik tersebut dapat digambarkan.[41]

---

[40] Mohammad Basrowi dan Soenyono, *Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, (Surabaya: Yayasan Kampusina, 2004), hal. 35-36

[41] Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti menganggap penting terhadap penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian ini, karena dengan adanya hasil penelitian terlebih dahulu akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, minimal menjadi pedoman.

Achmad Rizal, meneliti tentang "Konflik Sosial Nelayan (Studi Kasus Konflik Sosial Nelayan Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Dengan Masyarakat Nelayan Desa Sekitar). Bentuk-bentuk konflik sosialnya adalah fisik dan non fisik: adanya penyerbuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak nelayan yang sedang bersengketa sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa maupun terluka. Sedangkan dalam bentuk non fisik yaitu adanya pembakaran perahu, alat tangkap dan adanya rasa dendam dan saling menghina. Potensi konflik ini dikarenakan rendahnya kesadaran yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan ketidak seriusan (Pemkab) Pemerintah Kabupaten dalam pembagian wilayah perairan laut yang sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberikan desentralisasi pengelolaan sumber daya kelautan.

Anifatul Khoiriyah, meneliti tentang konflik yang berjudul "Pondok Pesantren At-Thohiriyah Dan Pengaruhnya Terhadap Konflik Tokoh Masyarakat". Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kekuasaan, kedudukan atau karena mempertahankan identitas diri semata. Manusia berusaha menggiatkan diri agar mendapat hal-hal yang dianggap baik, lalu ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih di satu pihak menganggap sama mempunyai hal atau hal tersebut kemungkinan akan terjadi suatu konflik atau pertikaian.

Lailatur Rizqiyah Hawa, meneliti tentang konflik sosial politik yang berjudul "Konflik dan Pemilu (Kajian Sosiologis Tentang Konflik Sosial Pada Masyarakat Partisipan Pemilu 2004 di Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo)". Terjadinya konflik sosial pada masyarakat karena adanya pengaruh dari lingkungan atau dari luar masyarakat. Adapun dikatakan dari dalam diri masyarakat karena itu memang ada tanpa adanya pengaruh dari luar. Seperti sikap fanatisme masyarakat yang berlebihan, sehingga mereka mengaitkan antara agama dan partai politik. Pendidikan masyarakat yang rendah, membuat mereka beranggapan walaupun berpendidikan tinggi tapi ujung-ujungnya kembali kepada agraria.

Abdul Lathif, meneliti tentang tokoh masyarakat yang dapat menghambat dakwah, berjudul "Dakwah Dan Konflik Tokoh Masyarakat (Kajian Tentang Penghambat Dakwah Di Desa Wonokerto, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)". Konflik yang terjadi antara tokoh masyarakat adalah murni karena faktor internal, yaitu karena masalah politik dan kekuasaan, dendam pribadi antara tokoh masyarakat dan masalah perebutan lembaga pendidikan. Dengan adanya konflik inilah segala aktivitas baik keagamaan yang berbentuk dakwah atau aktivitas sosial lainnya menjadi tidak stabil, karena masyarakat tidak ingin hadir dalam kegiatan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id